

**ANALISIS ALOKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : FITRIANI
NIM : 22 2011 070**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

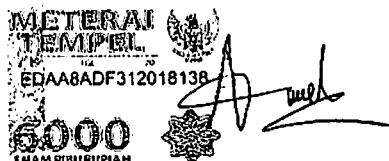
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitriani
Nim : 22 2011 070
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2015



Fitriani

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS ALOKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nama : Fitriani
Nim : 22 2011 070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing



Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
NIDN : 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN : 0228115802/1021961

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ Kerjakanlah pekerjaanmu dengan niat tulus dan peruh keiklasan, maka akan kamu terima hasil yang memuaskan dan Jika kamu mengerjakan sesuatu dengan keterbatasan Maka hasil yang diperoleh akan berantakan.
- ❖ Percaya diri itu adalah kunci keberhasilan kita untuk menggapai segala hal.

(Fitriani)

Persembahan :

- ❖ Ayahku (Firmansyah) mengajarkanku untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur atas apa yang ku peroleh.
- ❖ Ibuku (Ruwmini) yang memberiku support dalam setiap usahaku.
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta (Lidya Sari dan Della Puspita)
- ❖ Bapak M. Fahmi S.E. M.Si
- ❖ Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- ❖ Almamaterku tercinta

PRAKATA



Asaalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis penyatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan dan saran.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Firmansyah dan Ibunda Tersayang Rusmini dan saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi SE.M.Si, yang telah membimbing, dan memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. M. Idris, SE. M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang serta staf dan karyawan / karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, SE.M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E. Ak. M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.
4. Ibu Welly SE. M.Si selaku wakil program studi akuntansi dan pembimbing akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak H.Muslim,S.E.,M.Si dan KASUBAG Umum dan kepegawaian bapak Yossi Hervandi,S.E.,M.M beserta bapak Suryanto,S.E.,M.M selaku KASUBAG Perencanaan yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi menenai data-data yang diperlukan penulis.
8. Paman ku Tazril ,ST. dan adik- adikku yang aku sayang, Lidya Sari dan Della Puspita yang memberi semangat dan mendo'akan penulis atas kaberhasilan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku, Ade Fitri Widayastuti, S.E, Analia, S.E, Septi, Dwi, Tina, Aan dan Zepi.

Semoga Allah membalas budi baik kalian. Akhrikul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Agustus 2015

FITRIANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GRAFIK.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori	8
1. Anggaran.....	8

2. Fungsi Anggaran.....	8
3. Proses Penyusunan Anggaran.....	11
4. Pemendagri No.13 Tahun 2006	12
5. Struktur APBD	14
6. Pendapatan Daerah	14
a. Pendapatan Asli Daerah	15
b. Dana Perimbangan.....	22
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Operasionalisasi Variabel.....	25
D. Data Yang Digunakan.....	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Pemprov	30
2. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SUMSEL.....	31
3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.....	32
4. Visi dan Misi Dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan	35

1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan	36
2. Jenis Pelayanan.....	37
3. Analisis Lingkungan Internal Dinas Pendapatan Daerah.....	38
4. Analisis Lingkungan Eksternal	41
A. Pembahasan	43
Analisis Alokasi Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	4
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	7
Tabel III.1 Overasional Variabel	26
Tabel IV.1 Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2010	46
Tabel IV.2 Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2012.....	47
Tabel IV.3 Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2014.....	48
Tabel IV.4 Alokasi Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2010	49
Tabel IV.5 Alokasi Realisasa Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2012	50
Tabel IV.6 Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2014	51

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik IV.1 Anggaran Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	52
Grafik IV.2 Realisasi Perubahan Pendapatan Asli Daerah.....	53
Grafik IV.3 Anggaran Perubahan Dana Perimbangan	55
Grafik IV.4 Realisasi Perubahan Dana Perimbangan.....	56
Grafik IV.5 Anggaran Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	57
Grafik IV.6 Realisasi Perubahan -lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampian 1 Data Proyeksi APBD, Anggaran Perubahan dan Realisasi**
- Lampian 2 Daftar Wawancara**
- Lampian 3 Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi**
- Lampian 4 Surat Balasan Riset**
- Lampian 5 Surat Selesai Riset**
- Lampian 6 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi**
- Lampian 7 Sertifikat Lulus Membaca dan Hafalan Al-Quran**
- Lampian 8 Sertifikat KKN**
- Lampian 9 Sertifikat Lulus TOEFL**
- Lampian 10 Biodata Penulis**

ABSTRAK

Fitriani /222011070/2015, Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014. Tujuannya untuk mengetahui alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabe atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar avariabel satu dengan variabel lain. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014 mengalami kenaikan dan penurunan dimana pendapatan asli daerah mengalamami kenaikan yang signifikan mulai dari anggaran hingga realisasinya, dibandingkan dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana realisasinya masih belum tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Alokasi Perubahan, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Fitriani/ 222011070/ 2015, The analysis of the budget revenue change allocation of South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this research is how the allocation of the local budget revenues change in South Sumatra province in 2009-2014 was. The goal is to determine the local budget revenues change allocation of South Sumatra province in 2009-2014.

This study was a descriptive study because it aimed to know the value of an independent variables, either one variable or more without making a comparison between variable or connecting one variable with the other variables. The data used were primary data and secondary data. The data were obtained by using documentation. The method of data analysis used in this research was qualitative analysis.

The results of the study revealed that the changes in the local revenue budget allocation of South Sumatra province in 2009-2014 had increased and decreased where local revenues had significant increase ranging from the budget to the realization, as compared to the balance funds and other legitimate local revenues where the realization had not been achieved maximally.

Keywords: *allocation changes, Local Revenue*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonom sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi sesuai ketentuan undang-undang no.12 tahun 2008 ada dua tingkatan daerah otonom yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibagi menjadi daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/ kota). Cirri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Perimbangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintah dapat menutup keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing.

Mardiasmo (2001:1) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari otonomi daerah, dan desentralisasi mengembangkan misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah baik

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Dibentuknya daerah otonom yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemeritah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan agar dapat berfungsi secara efektif dan tercapainya tujuan pembentukan daerah otonomi, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satunya dalam bidang pegelolaan keuangan daerah, meliputi: pemungutan sumber-sumber pendapatan, penyelenggaraan, pengurus, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, penetapan APBD dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kinerja yang baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam suatu organisasi, untuk menghasilkan kinerja yang baik diperlukan serangkaian proses kinerja manajemen. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategi planning*) suatu organisasi (Indra,2001:329). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham,2012;2).

Pendapatan daerah (PATDA) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang diaggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah yang merupakan gabungan dari beberapa komponen-komponen penerimaan daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa komponen-komponen pendapatan daerah (PATDA) meliputi:Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya.Pajak merupakan salah satu sumber pokok dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, yang juga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan daerah khususnya dalam PAD. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai guna memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin bertambah dan beragam pula.Sumber Pendapatan daerah tentunya masih bersandar pada penerimaan

pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat serta bisa juga berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber PAD pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berikut ini tabel mengenai target dan realisasi penerimaan anggaran pendapatan daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2009-2014.

**Tabel I. 1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan**

Tahun	Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan		Percentase (%)
	Anggaran	Realisasi	
2009	Rp. 2.688.797.318.900	Rp. 2.397.685.724. 174	89,17
2010	Rp. 3.210.708.852.693	Rp. 3.222.588.807. 133	100,37
2011	Rp. 3.788.678.701.400	Rp. 3.963.984.966. 161	104,63
2012	Rp. 5.028.742.103.378	Rp. 5.223.940.074.138	103,88
2013	Rp. 6.000.782.738.000	Rp. 5.468.139.691.033	91,12
2014	Rp. 6.478.705.535.564	Rp. 6.237.392.909.543	96,28

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Berdasarkan uraian Tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012 tapi tahun 2009 dan 2013 pendapatan daerah belum tercapai secara maksimal. Tahapan dalam alokasi penganggaran dari APBD meliputi tahapan pembahasan rancangan, penetapan, perubahan dan pertanggung jawaban, sehingga perubahan alokasi anggaran pendapatan daerah provinsi sumatera selatan apakah sudah signifikan atau belum dari rancangan hingga realisasinya.

Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penerimaan pendapatan daerah.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PATDA).

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi almamater dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II. 1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Hasil Analisis	Persamaan dan Perbedaan
1	Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Kota Palembang". (Dini Ardiah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Sehingga belanja langsung ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang memerlukan kesehatan.	Persamannya dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama menganalisis alokasi anggaran. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian sebelumnya objek yang ditemui mengenai belanja langsung pada dinas kesehatan kota palembang.
2	Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011" (Fitri Nurhadi,2012)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2008-2010 Mengalami penurunan pendapatan, sedangkan pada tahun 2007 dan 2011 mengalami peningkatan.	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa kedua penelitian ini sama-sama menganalisis alokasi anggaran. Sedangkan perbedaan peneliti sebelumnya adalah peneliti menganalisis alokasi anggaran belanja daerah, sedangkan penelitian sekarang menganalisis alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.
3	Penelitian sebelumnya berjudul " Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Visi dan Misi Kabupaten Lahat. (Sirli Gusniarti,2014)	Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2009-2012 mengalami defisit, dimana pendapatan daerah lebih kecil dari pada belanja daerah.	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis alokasi perubahan anggaran, perbedaannya penelitian sekarang menganalisis pendapatan daerah sedangkan yang sebelumnya mengenai APBD.

Sumber: Penulis 2014

B. Landasan Teori

1. Anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategis dan perencanaan strategis yang dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun (mardiasmo,2002).

2. Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2002) Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa

yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinanya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

e. Anggaran Sebagai Alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendekripsi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang

berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achieveable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat LSM, perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

3. Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah yang dipersentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberikan informasi rincian kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat,

dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu:

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintahan.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 (6) disebutkan bahwa pengertian dari Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pifatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1 (8)).

Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud tugas pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Menyusun rancangan dan perubahan
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

5. Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah.

b. Belanja Daerah

adalah semua peneluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran dan berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab kepada masarakat dan pemerintah pusat.

c. Pembiayaan Daerah

adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, dan perlu dibayar atau akan diterimah kembali, dan dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pendapatan Daerah (PATDA)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, haril retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 79, tentang pemerintah daerah, bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, yang dimana penerimaan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1) Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membantu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut peraturan pemerintah No. 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah semua pungutan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pajak atas daerah yang bersangkutan dan belum dipungut pemerintah pusat.

Pajak menurut Abdul Halim tahun 2004 adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman melainkan sebagai

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal (kontra prestasi) yang ditanggung dapat ditampilkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mohammad,2008). Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan mengenai definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Tujuan pajak provinsi dan retribusi merupakan sarana dan prasarana bagi pemerintah untuk dapat membiayai setiap belanja dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan hajat dan kepentingan rakyatnya.Pajak dan retribusi daerah mempunyai andil yang sangat besar dalam melakukan pembangunan. Tujuan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan daerah.
- b) Untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c) Pemberian kewenangan dalam penggunaan pajak dan retribusi daerah.

(1) Jenis Pajak Daerah

UU No. 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur dan ditetapkan kewenangan pemungutan pajak-pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi.Pajak kabupaten/kota terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Adapun untuk jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (PKB/PKAA), bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (BBN-KB/BBN-KAA), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3 ABT- AP).

(2) Upaya untuk meningkatkan pajak daerah

Pemerintah daerah dalam upaya untuk memaksimalkan potensi pajak daerah diantaranya melakukan pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi secara rutin kepadawajib pajak,

serta memperluas objek pajak daerah. Dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak daerah agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan pajak daerah. Adapun upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak:

- a. Memperluas basis penerimaan, tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial.
- b. Memperkuat proses pemungutan, upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain, dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat meningkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala dengan memperbaiki proses pengawasan.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak.
- e. Meningkatkan kafasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2) Retribusi Daerah

UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa penggolongan atau pengelompokan retribusi daerah adalah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan. Penggolongan atau pengelompokan jenis-jenis retribusi ini berlaku sama antara pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, akan tetapi untuk penerapan atau pemberlakuan pemungutannya pada masing-masing daerah akan sangat ditentukan oleh jenis kewenangan dan potensi yang tersedia pada masing-masing daerah tersebut.

Retribusi daerah adalah pembayaran dari penduduk/masyarakat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduk secara perorangan. Pengertian Retribusi Daerah adalah pugutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Marihot,2010:5). Jenis-jenis Retribusi Daerah

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemafaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Undang-undang no. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirincian menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah

Undang-undang no. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut ini:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

b. Dana Perimbangan

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan adalah merupakan bagian atau komponen dari penerimaan pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran akan tergambar pada sisi pendapatan dalam penyusunan APBD provinsi Sumatera Selatan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan maupun perkotaan. Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) tingkat eksplanasi adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.

1. Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan bersifat untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jalan POM IX Kampus-Palembang-Kode Pos 30137.
 Telpon: (0711) 310633,355107 Faksimile: (0711) 319819 E-mail:
pdf@dispendaprovsumsel.co.cc.

C. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 1
Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Idikator
1	Perubahan Alokasi Pendapatan Daerah	Perubahan alokasi anggaran mengenai estimasi kinerja pemerintah daerah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.	1. Alokasi Pendapatan Asli Daerah 2. Alokasi Dana Perimbangan 3. Alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber: Penulis 2014

D. Data yang digunakan

Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2009:146-147), sumber data penelitian terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pihak kepala bagian perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen/data mengenai penerimaan pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 194-203) teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penelitian ini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2. Kuisoner

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner .

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah memperoleh data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis , kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dokumen atau data yang relevan mengenai target dan realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Sugiyono (2012:13) penelitian menurut jenis data analisis terdiri dari:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau penafsiran.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menyajikan angka atau data mengenai pendapatan daerah. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel dan uraian penjelasan mengenai alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 1973 berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Tingkat 1 Sumatera Selatan Nomor 9/Perda/1973/1974 tentang Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dan diundangkan berdasarkan Pasal 69 G.S No. 5 Tahun 1974 dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan Nomor 1 tanggal 30 April tahun 1977 Seri D Nomor 4.

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan adalah untuk menunjang usaha-usaha pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana perlunya mengintensifikasi pemungutan pajak-pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah.

2. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekosentralisi,Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha,urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

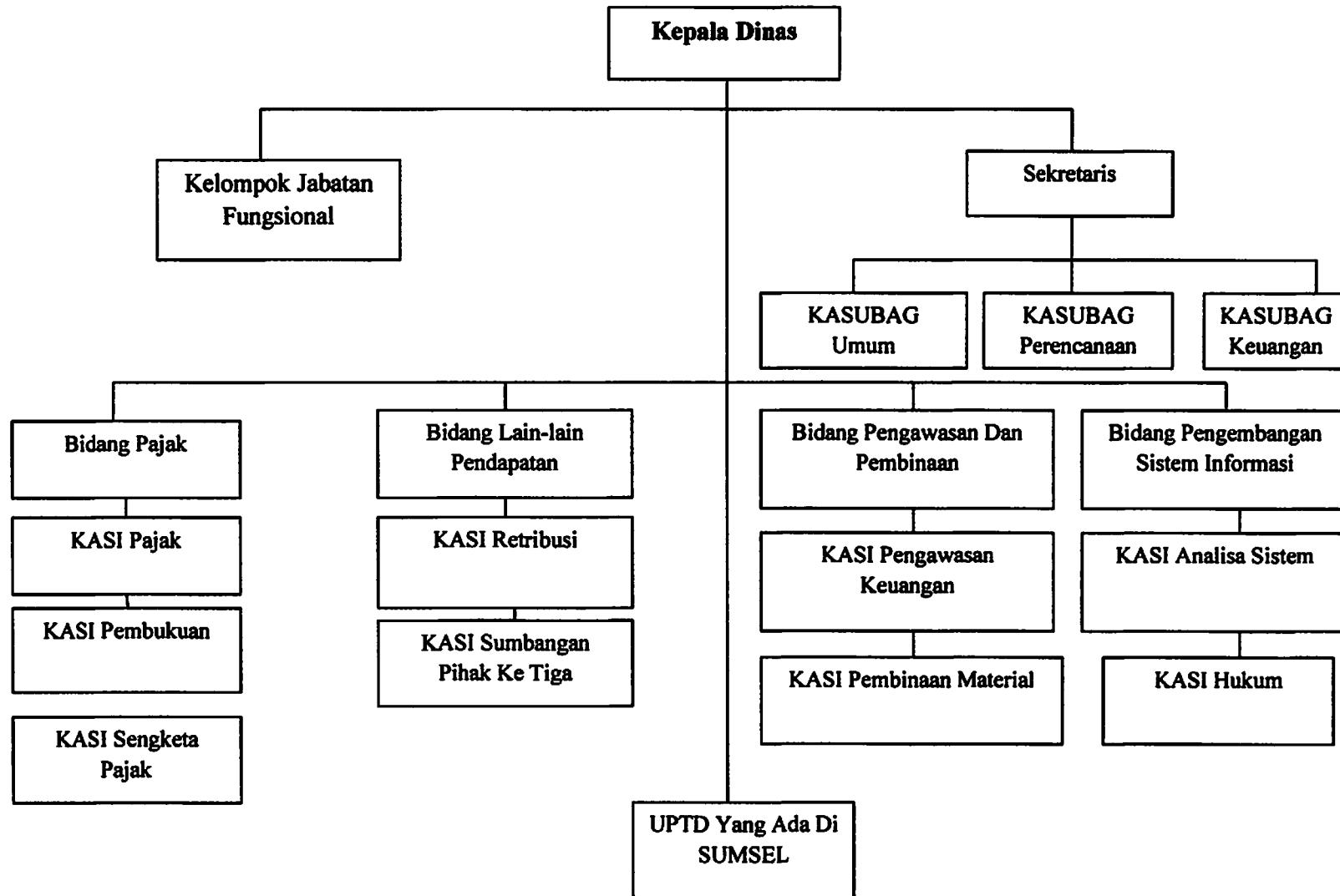
3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah**a. Kepala Dinas****b. Sekretariat, membawahi:****1. Subbagian Umum dan Kepegawaian****2. Subbagian Perencanaan****3. Subbagian Keuangan****c. Bidang Pajak, membawahi:****1. Seksi Pajak****2. Seksi Pembukuan****3. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi****d. Bidang Pendapatan lain-lain, Membawahi;****1. Seksi Retribusi****2. Seksi Penerimaan Pusat****3. Seksi Sumbangan Pihak Ketiga dan Penerimaan Lain-lain.****e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:****1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Personil****2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi****3. Seksi Pembinaan Material****f. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengeloaan PATDA,
membawahi:****1. Seksi Analisa Sistem dan Pengembangan Informasi****2. Seksi Pengolahan Pendapatan Daerah****3. Seksi Hukum dan Perundang-undangan**

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 15 (lima belas) UPTD yang tersebar dikabupaten/ kota.

- 1. Dispenda Provinsi Sumatera Selatan**
- 2. UPTD Kota Palembang**
- 3. UPTD Kabupaten Muba**
- 4. UPTD Kabupaten Banyuasin**
- 5. UPTD Kabupaten OKI**
- 6. UPTD Kabupaten Ogan Ilir**
- 7. UPTD Kabupaten OKU**
- 8. UPTD Kabupaten OKU Timur**
- 9. UPTD Kota OKU Selatan**
- 10. UPTD Kota Prabumulih**
- 11. UPTD Kabupaten Muara Enim**
- 12. UPTD Kabupaten Lahat**
- 13. UPTD Kota Pagar Alam**
- 14. UPTD Kabupaten Mura**
- 15. UPTD Kota Linggau**

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan



4. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

a. Visi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didasarkan atas visi yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah Sebagai Potensi Utama Meningkatkan dan Memeratakan Pembangunan dengan Mengutamakan Pelayanan”

b. Misi

1) Meningkatkan Pelayanan Secara Optimal.

Pelayanan kepada masyarakat perlu mendapatkan perhatian agar dengan pelayanan yang prima yang berupa *one day service* dapat menggugah wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban.

2) Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap pembangunan.

Peran aktif masyarakat terhadap pembangunan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi dan lain-lain.

3) Meningkatkan peran aktif Dinas/ Instansi Pemungutan Pendapatan Daerah.

Dinas/ Instansi pemungut diharapkan memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diemban dibidang pendapatan daerah untuk itu senantiasa perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi yang terkait.

4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah harus dapat ditingkatkan agar keinginan yang terkandung didalam Visi diharapkan dapat terwujud.

5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan**a. Tujuan**

- 1) Terwujudnya pelayanan prima
- 2) Terciptanya budaya masyarakat yang sadar membayar pajak dan retribusi.
- 3) Terwujudnya koordinasi yang baik di antara Dinas/ Instansi pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan professional
- 5) Terwujudnya pendapatan daerah secara optimal

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan kualitas aparat pelayanan
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/ Instansi pemungut pendapatan daerah
- 5) Peningkatan Intensifikasi/ ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

c. Strategi

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik di bidang administrasi maupun yang secara langsung yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional.
- 3) Melakukan pendeatan dengan pihak BUMN,BUMN dan BUMS.
- 4) Memfasilitasi kegiatan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

d. Kebijakan

- 1) Peningkatan pelayanan prima bagi pembayaran pajak di UPTD-UPTD/Samsat Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.
- 2) Mempermudah pengurusan kendaraan luar Provinsi yang beroperasi di sumatera selatan untuk memutasikan kendaraannya.

6. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

a. Jenis Pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak provinsi disamping sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah lainnya. Berdasarkan Undang-undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak provinsi terdiri dari.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air (PKB dan PKAA)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air (BBNKB dan BBNKAA)

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan P3ABT dan AP)

b. kelompok sasaran

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran PKB, BBNKB, PKAA, BBNKAA, P3AP dan P3AP ditujukan kepada :

- a) Orang Pribadi
- b) Badan (PT,CV,BUMN, dan lain-lain.

7. Analisis Lingkungan Internal Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan memiliki kekuatan untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah maupun pendapatan daerah dan memiliki kelemahan yang dapat menghambat terealisasinya pendapatan tersebut secara maksimal. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diharapkan sejak dini dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan maupun mendayaunakan kekuatan untuk mengantisipasi berbagai kelemahan yang ada.

a. Kekuatan

Merealisasikan penerimaan pendapatan daerah secara maksimal diperlukan adanya pendukung dari berbagai sektor antara lain sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dana

2) Tersedianya aparatur yang berkualitas.

Dalam mewujudkan pendapatan daerah secara maksimal diperlukan adanya aparatur yang berkualitas, dedikasi kerja yang tinggi dan professional dalam melaksanakan tugas.

Membentuk aparatur yang berkualitas tersebut dinas pendapatan daerah telah mengambil langkah-langkah antara lain, mengirimkan pegawai untuk menikuti kursus structural dan kursus fungsional di bidang pendapatan daerah.

3) Tersedianya sarana dan prasarana.

Melaksanakan tugas di lingkungan dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan diperlukan sarana pendukung sebagai penunjang kegiatan operasional maupun kegiatan administrasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah. Dengan tersedianya sarana mobilisasi, dan komputerisasi maka diharapkan kinerja aparatur dapat terwujud secara maksimal.

4) Tersedianya program kerja.

Meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal perlu didukung oleh proram kerja yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

a) Adanya tim Pembina SAMSAT.

Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pemungutan PKB dan BBNKB yang berada dilingkungan kantor bersama samsat dibentuk Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur pihak kepolisian, dinas pendapatan

daerah provinsi sumatera selatan serta PT. AK. Jasa Raharja (Persero).

Peranan dari tim Pembina Samsat tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dikantor bersama samsat serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul.

b) Penyuluhan Pajak dan Retribusi.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak/retribusi daerah, perlu dilakukan sosialisasi/ penyuluhan baik melalui media cetak, elektronik ataupun penyuluhan langsung kelapangan.

b. Kelemahan

Upaya dalam merealisasikan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah secara maksimal, beberapa aspek internal turut menentukan untuk diantisipasi antara lain yaitu:

1) Terbatasnya kemampuan aparatur.

Menggali dan merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara maksimal maka sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Pemahaman di bidang tugas dan pengetahuan yang dimiliki sangat mempengaruhi kinerja dari aparatur tersebut, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan diperlukan pendidikan dan pelatihan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan meningkatkan sumber daya manusia diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.

2) Kurangnya koordinasi antar instansi.

Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang harmonis di antara dinas/instansi sebagai coordinator pemungut dan pengelolaan pendapatan daerah.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah.

Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak masih dianggap sebagai suatu kelemahan untuk merealisasikan pendapatan daerah secara maksimal. Upaya untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, dinas pendapatan daerah mengambil langkah-langkah kebijakan yaitu melaksanakan program sosialisasi/ penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah, baik melalui media massa, elektronik maupun penyuluhan langsung/ tatap muka.

4) Terbatasnya dana

7. Analisis Lingkungan Eksternal

Upaya untuk peningkatan pendapatan daerah terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi, yaitu peluang dan ancaman.

a. Peluang

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan untuk merealisasikan pendapatan daerah secara maksimal yaitu adanya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Peluang tersebut yaitu:

1) Undang-undang.

Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.

2) Adanya PMA, PMDN, BUMN, BUMD dan BUMS

Adanya peningkatan investasi dari para investor merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan perekonomian yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun investor itu sendiri, yang pada gilirannya merupakan potensi bagi sumber-sumber pendapatan daerah yang didukung dengan kondisi keamanan yang kondusif akan memungkinkan investor untuk berusaha dan menginvestasikan modalnya di sumatera selatan.

3) Pembangunan pelabuhan tanjung api-api.

Rencana pembangunan pelabuhan tanjung api-api telah terwujud maka akan menunjang perkembangan perekonomian sumatera selatan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

4) Teknologi dan komunikasi.

Menarik investor menanamkan modalnya tergantung pula dari sarana dan prasarana yang tersedia di sumatera selatan antaralain sarana informasi dan komunikasi. Tersedianya sarana tersebut akan memudahkan komunikasi yang diperlukan oleh para investor.

b. Ancaman

Dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah terdapat faktor-faktor ancaman yang dapat mempengaruhi upaya tersebut diatas, yaitu:

1) Krisis ekonomi global.

Krisis ekonomi global yang terjadi akhir-akhir ini dan adanya penurunan harga minyak akan dapat berpengaruh pula terhadap penerimaan pendapatan daerah.

2) Kurangnya penegakan supremasi hukum.

Dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak-pajak daerah masih terkendala terhadap lemahnya penegakan supremasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kenyataan ini terlihat dari banyaknya tunggakan pajak terutama pajak kendaraan bermotor (PKB) disamping tunggakan pajak lainnya.

B. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk mengetahui alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

Analisis Perubahan Alokasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kewajiban daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah fungsi alokasi, bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Anggaran pendapatan daerah merupakan suatu anggaran daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Dalam melaksanakan setiap kegiatannya pemerintah daerah harus mempunyai penganggaran atas kegiatan yang akan dilakukan. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rancangan keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.

Sebelumnya telah disajikan data meliputi gambaran umum, tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan. Pembahasan pada Bab IV ini menyangkut masalah Bagaimana alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan.

Dinas pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah provinsi disamping sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah lainnya, untuk langkah-langkah ke depan guna mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. Alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan daerah provinsi sumatera selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan 2010

KETERANGAN	TAHUN 2009		(%)	TAHUN 2010		(%)
	Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan		Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.171.643.283.800	Rp. 1.173.768.283.800	0,18	Rp. 1.496.643.283.800	Rp. 1.363.164.448.550	-9,79
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.539.030.040.700	Rp. 1.505.609.787.700	-2,21	Rp. 1.575.609.787.700	Rp. 1.797.286.216.801	12,33
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 9.419.247.400	Rp. 9.419.247.400	0	Rp. 59.419.247.400	Rp. 50.258.187.342	-8,28
Total PATDA	Rp. 2.720.092.571.900	Rp. 2.688.797.318.900	-1,16	Rp. 3.131.672.318.900	Rp. 3.210.708.852.693	2,46

Sumber: Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Tabel 2
Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 dan 2012

KETERANGAN	TAHUN 2011		(%)	TAHUN 2012		(%)
	Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan		Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.563.704.000.000	Rp. 1.687.295.615.400	7,32	Rp. 1.899.649.695.000	Rp. 1.907.709.081.676	0,42
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.859.991.000.000	Rp. 1.988.938.313.000	6,48	Rp. 2.205.077.535.000	Rp. 2.240.011.913.025	1,55
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 11.789.000.000	Rp. 112.444.773.000	89,51	Rp. 834.420.720.000	Rp. 881.021.108.677	5,28
Total PATDA	Rp. 3.435.484.000.000	Rp. 3.788.678.701.400	9,32	Rp. 4.939.147.950.000	Rp. 5.028.742.103.378	1,78

Sumber: Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Tabel IV. 3
Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2014

KETERANGAN	TAHUN 2013		(%)	TAHUN 2014		(%)
	Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan		Proyeksi APBD	Anggaran Perubahan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.287.016.036.000	Rp. 6.000.782.738.000	-3,27	Rp. 2.482.128.778.000	Rp. 2.595.724.088.303	4,35
2. Dana Perimbangan	Rp. 2.644.842.763.000	Rp. 2.951.325.613.000	10,38	Rp. 3.841.411.648.000	Rp. 3.056.056.793.031	25,70
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 836.007.720.000	Rp. 835.036.880.000	-0,11	Rp. 813.335.450.000	Rp. 826.924.654.230	1,64
Total PATDA	Rp. 5.767.866.519.000	Rp. 6.000.782.738.000	3,88	Rp. 7.136.875.876.000	Rp. 6.478.705.535.564	-10,15

Sumber: Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Tabel IV. 4
Alokasi Realisaasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan 2010

KETERANGAN	TAHUN 2009		(%)	TAHUN 2010		(%)
	Anggaran Perubahan	Realisasi		Anggaran Perubahan	Realisasi	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.173.768.283.800	Rp. 1.054.332.693.090	89,82	Rp. 1.363.164.448.550	Rp. 1.369.935.856.700	100,50
2. Dana Perimbangan	Rp. 82.970.000.000	Rp. 1.333.161.325.812	88,85	Rp. 1.797.286.216.801	Rp. 1.823.059.236.629	101,43
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 9.419.247.400	Rp. 10.191.705.272	108,20	Rp. 50.258.187.342	Rp. 29.593.713.804	58,88
Total PATDA	Rp. 2.688.797.318.900	Rp. 2.397.685.724.174	89,17	Rp. 3.210.708.852.693	Rp. 3.222.588.807.133	100,37

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Tabel IV. 5
Alokasi Realisaasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2011

KETERANGAN	TAHUN 2011		(%)	TAHUN 2012		(%)
	Anggaran Perubahan	Realisasi		Anggaran Perubahan	Realisasi	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.687.295.615.400	Rp. 1.849.119.912.016	109,59	Rp. 1.907.709.081.676	Rp. 2.001.714.583.551	104,93
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.988.938.313.000	Rp. 1.992.557.000.412	100,18	Rp. 2.240.011.913.025	Rp. 2.378.798.650.801	106,20
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 112.444.773.000	Rp. 122.308.053.733	108,77	Rp. 881.021.108.677	Rp. 843.426.839.966	95,73
Total PATDA	Rp. 3.788.678.701.400	Rp. 3.963.984.966.161	104,63	Rp. 5.028.742.103.378	Rp. 5.223.940.074.318	100,37

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Tabel IV. 6
Alokasi Realisaasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 dan 2014

KETERANGAN	TAHUN 2013		(%)	TAHUN 2014		(%)
	Anggaran Perubahan	Realisasi				
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.000.782.738.000	Rp. 5.468.139.691.033	91,30	Rp. 2.595.724.088.303	Rp. 2.407.927.104.791	92,77
2. Dana Perimbangan	Rp. 2.951.325.613.000	Rp. 2.649.216.454.338	89,76	Rp. 3.056.056.793.031	Rp. 2.982.866.000.798	97,61
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 835.036.880.000	Rp. 797.226.449.420	95,47	Rp. 826.924.654.230	Rp. 846.599.803.953	102,38
Total PATDA	Rp. 6.000.782.738.000	Rp. 5.468.139.691.033	91,12	Rp. 6.478.705.535.564	Rp. 6.237.392.909.543	96,28

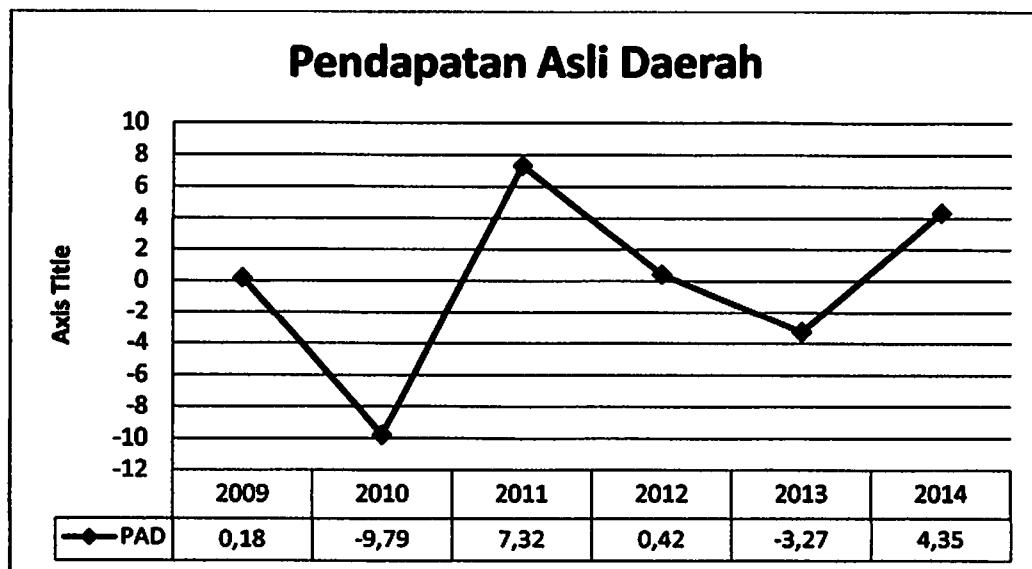
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2014

Dari tabel IV diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi perubahan dan persentase realisasi perubahan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran perubahan dan persentase realisasi perubahan pendapatan asli daerah.

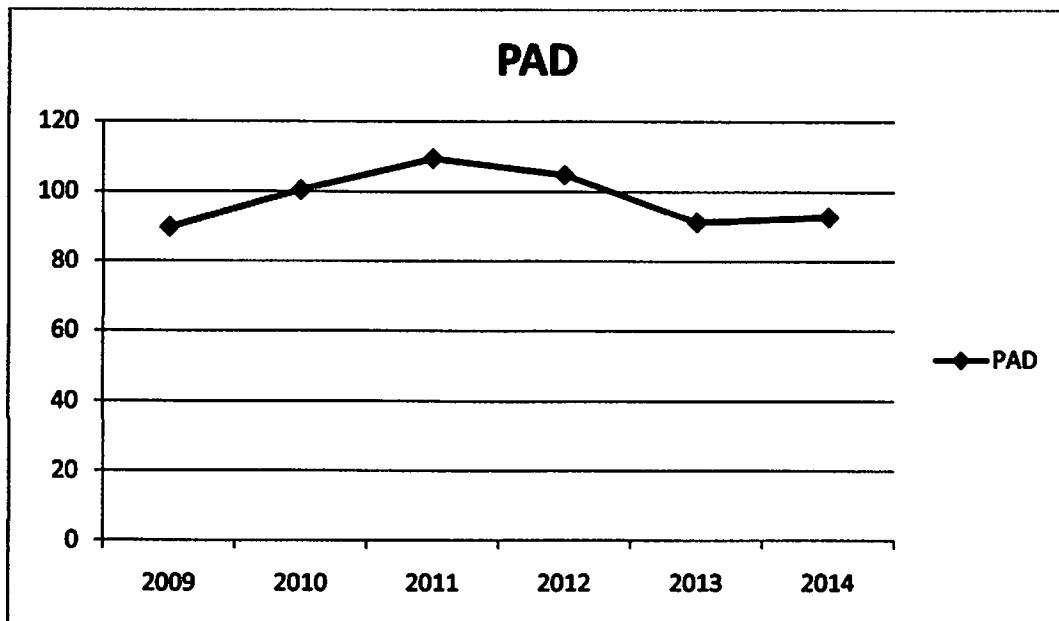
Berdasarkan grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase anggaran perubahan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil penurunan terjadi pada tahun 2009. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2010. Jika dilihat dari grafik pada tahun 2011 menunjukan bahwa proyeksi APBD ke anggaran perubahan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 dan 2013 proyeksi APBD ke anggaran perubahan mengalami penurunan, kemudian tahun 2014 anggaran kembali meningkat.

**Grafik IV.1
Persentase Anggaran Perubahan
Tahun 2009-2013**



Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada KASUBAG Perencanaan bahwa anggaran perubahan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang mengalami peningkatan dimana pada saat itu harga karet menjadi mahal sehingga berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah, sedangkan tahun 2012 dan 2013 penurunan pada pendapatan asli daerah juga disebabkan oleh faktor ekonomi dimana para petani khususnya petani karet mengalami kerugian karena harga karet saat ini menurun sehingga penerimaan daerah menurun. Dapat dilihat grafik dibawah ini mengenai peningkatan dan penurunan persentase anggaran perubahan pendapatan asli daerah dari tahun 2009-2014 .

Grafik IV.2
Persentase Realisasi Perubahan
Tahun 2009-2014

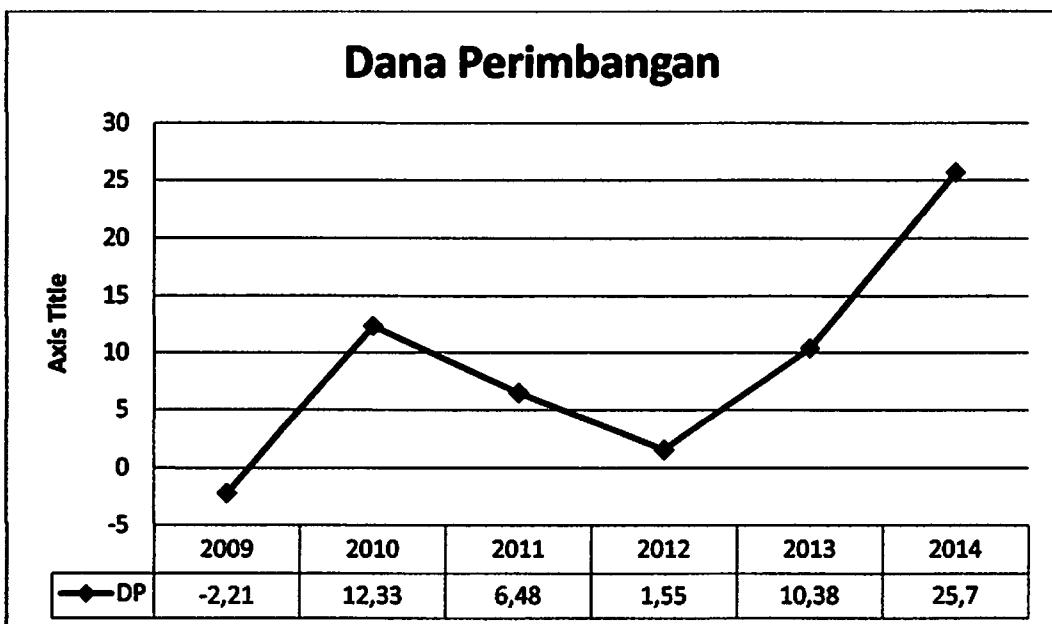


Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran perubahan pendapatan asli daerah tahun 2009-2014, bahwa pada tahun 2010 realisasi perubahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Kemudian tahun 2011 realisasi perubahan pendapatan asli daerah kembali meningkat. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 realisasi perubahan mengalami penurunan. Realisasi perubahan tahun 2014 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2013.

2. Alokasi anggaran perubahan dana perimbangan dan realisasi perubahan.

Berdasarkan grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa persentase anggaran perubahan dana perimbangan mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana pada tahun 2010 proyeksi APBD setelah anggaran perubahan meningkat dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2011 proyeksi APBD setelah anggaran perubahan mengalami penurunan dan pada tahun 2012 anggaran perubahan kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2013 anggaran perubahan meningkat dan pada tahun 2014 anggaran perubahan dana perimbangan meningkat jauh dari tahun-tahun lalu.

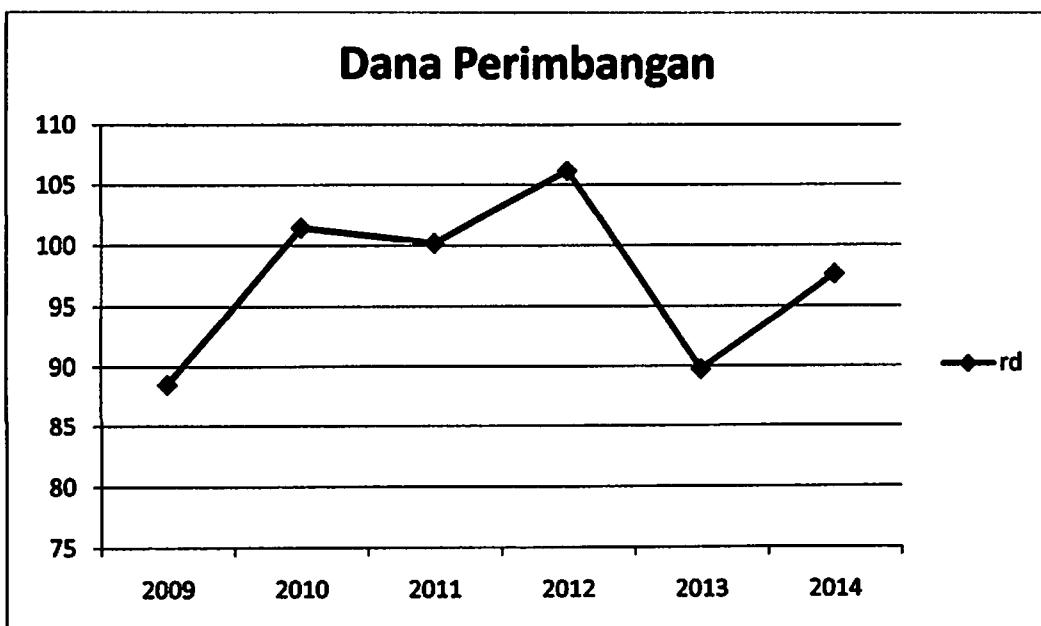
Grafik IV.3
Persentase Anggaran Perubahan
Tahun 2009-2014



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada KASUBAG perencanaan peningkatan yang terjadi pada tahun 2014

disebabkan faktor migas dimana produksi minyak mengalami peningkatan sehingga bagi hasil pada saat itu meningkat, penurunan yang terjadi pada perubahan dana perimbangan ini juga disebabkan oleh produksi migas yang menurun.

**Grafik IV.4
Realisasi Perubahan Anggaran
Tahun 2009-2014**

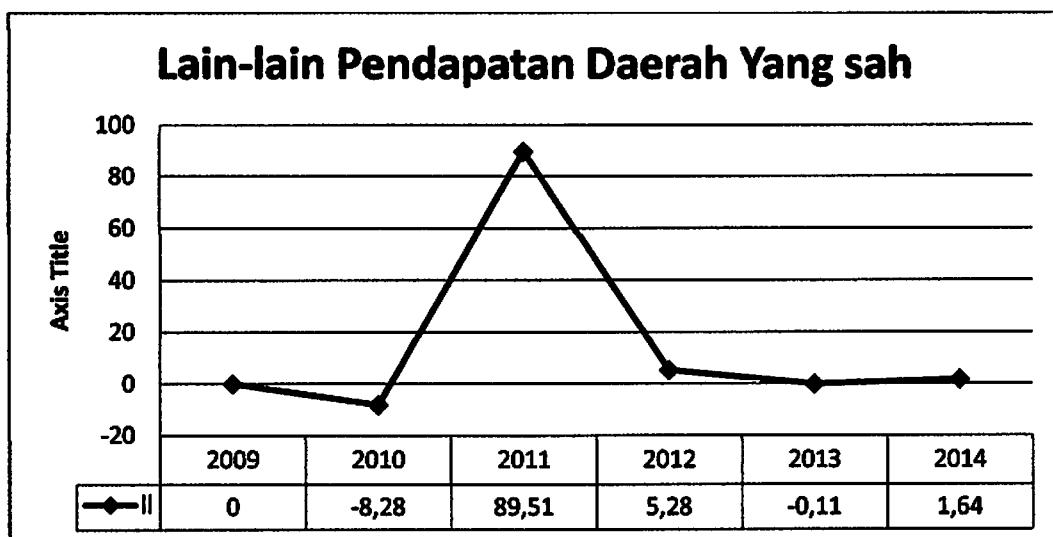


Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran perubahan dana perimbangan pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Kemudian tahun 2011 realisasi perubahan dana perimbangan mengalami penurunan dan pada tahun 2012 realisasi perubahan kembali meningkat. Pada tahun 2013 terjadi penurunan pada realisasi perubahan dan kembali meningkat pada saat realisasi perubahan tahun 2014.

3. Alokasi anggaran perubahan dan realisasi lain-lain pendapatan dearah yang sah.

Pada grafik diatas dapat dilihat persentase anggaran perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2009-2014. Pada tahun 2009 anggaran perubahan tidak mengalami perubahan dari dari pryeksi APBD. Pada tahun 2010 terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2011 anggaran perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan yang sangat maksimal. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 persentase lain-lain pendapatan daerah yang sah dari proyeksi APBD ke anggaran perubahan terus mengalami penurunan.

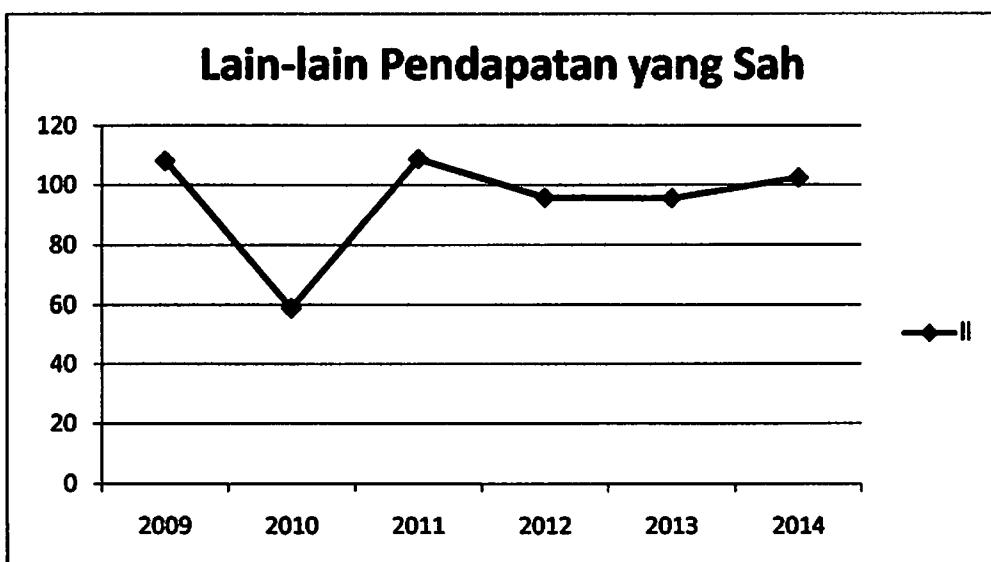
Grafik IV.5
Persentase Anggaran Perubahan
Tahun 2009-2014



Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada KASUBAG perencanaan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2011 dimana pada saat itu adanya sumbangan dari pihak ketiga (SP3) yang berasal dari BUMD. Sedangkan penurunan yang terjadi disebabkan kurangnya sumbangan

pihak ketiga yang berdampak berkurangnya penerimaan perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Grafik IV.6
Realisasi Perubahan Anggaran
Tahun 2009-2014



Pada grafik realisasi anggaran perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 realisasi perubahan mengalami penurunan dari tahun 2009. Pada tahun 2011 realisasi perubahan mengalami peningkatan dan terjadi penurunan pada realisasi perubahan ditahun 2012 dan 2013. Realisasi perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2014 kembali meningkat.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014 mengalami kenaikan dan penurunan mulai dari anggaran sebelum perubahan, anggaran setelah perubahan hingga realisasinya, dimana anggaran setelah perubahan selalu meningkat pertahunnya dibandingkan realisasi sehingga pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan belum tercapai maksimal. Peningkatan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migas dan sumbangan pihak ketiga (SP3). Alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah ini meliputi Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana pendapatan asli daerah dari tahun 2009-2014 selalu mengalami peningkatan yang signifikan dimulai dari anggaran hingga realisasi, sedangkan realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah masih belum tercapai maksimal.

B. Saran

Pada kesimpulan diatas maka pada bagian ini penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja SDM yang professional dan berakhhlak: jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif dengan cara melakukan pembinaan pada dinas pendapatan daerah khususnya yang ada di sumatera selatan.
2. Memperbaiki sistem manajemen yang kurang baik meliputi koordinasi penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan daerah serta membina administrasi keuangan.
3. Memberikan penyuluhan mengenai pajak guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.
4. Alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah seharusnya diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi penganguran .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat, Jakarta: Selemba Empat.
- Abdul Halim 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Selemba Empat, Jakarta.
- Fitri Nurhadi. 2012. *Analisis Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Diindonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Indra Fahmi. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Cv Alfabetta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2002. Andy Yogyakarta.
- Marihot. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Selemba Empat.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sirli Gusniarti. 2014. *Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lahat Tahun 2009-2012*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-16, Bandung: Cv Alfabetta.

Rincianan Prediksi Penyeriman RAPPID Tahun 2009

URAIAN	APBD 2008	APBD 2009	JUMLAH		BERTAMBAH BERCURANG	%
			PROYEKSI APBD 2009	BERTAMBAH BERCURANG		
PENDAPATAN DAERAH	2.617.007.698.200	2.720.092.571.900	78.084.373.700	3,94		
Pendapatan Asli Daerah	1.040.323.654.800	1.171.643.283.300	131.319.629.000	12,62		
Pajak Dneini	897.941.347.900	1.035.104.831.900	137.160.484.000	15,27		
<i>c) Hasil Retribusi Daerah</i>	12.324.666.900	12.968.451.900	644.785.000	5,22		
Hasil Pengelolaan	42.059.640.000	-40.600.000.000	(7459.640.000)	-3,47		
Kekayuan Keuangan yang dipersinkan						
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	87.995.000.000	82.070.000.000	(5.025.000.000)	-5,71		
dan Perimbangan	1.563.030.166.000	1.539.030.040.700	(29.000.125.300)	-1,35		
Lagi Hasil Pajak	319.770.740.000	344.722.387.700	24.951.647.700	7,30		
Lagi hasil Bukan Pajak	702.463.293.000	648.531.520.000	(53.951.773.000)	-7,63		
Hasil Alokasi Umum (DAU)	545.776.133.000	515.776.133.000	-	0,00		
Hasil Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	-		
Lain-lain Pendapatan	8.651.877.400	9.419.247.400	765.370.000	8,94		
Penyewahan yang Sah	8.641.650.000	9.410.020.000	765.370.000	8,35		
(sertengah titih ketiga)	9.227.400	9.227.400	-	0,00		
Jumlah Pendapatan	2.617.007.698.200	2.720.092.571.900	103.084.373.700	3,94		

**PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010**

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD PERUBAHAN 2009	PROYEKSI APBD 2010		
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.688.797.318.900,00	3.131.672.318.900,00	442.875.000.000,00	16,47
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.173.768.283.800,00	1.496.643.283.800,00	322.875.000.000,00	27,51
1.1.1.	- Pajak Daerah	1.035.104.831.900,00	1.360.104.831.900,00	325.000.000.000,00	31,40
1.1.2.	- Hasil Retribusi Daerah	12.968.451.900,00	12.968.451.900,00		0,00
1.1.3.	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	42.725.000.000,00	40.600.000.000,00	(2.125.000.000,00)	-4,97
1.4.	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	82.970.000.000,00	82.970.000.000,00		0,00
2.	Dana Perimbangan	1.505.609.787.700,00	1.575.609.787.700,00	70.000.000.000,00	4,65
2.1.	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	998.253.907.700,00	1.068.253.907.700,00	70.000.000.000,00	7,01
	- Bagi Hasil Pajak	344.722.387.700,00	344.722.387.700,00		0,00
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	653.531.520.000,00	723.531.520.000,00	70.000.000.000,00	10,71
2.2.	- Dana Alokasi Umum (DAU)	507.355.880.000,00	507.355.880.000,00		0,00
2.3.	- Dana Alokasi Khusus (DAK)				
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.419.247.400,00	59.419.247.400,00	50.000.000.000,00	530,83
3.1.	- Pendapatan Hibah (sumbangan pihak ketiga)	9.410.020.000,00	59.410.020.000,00	50.000.000.000,00	531,35
3.4.	- Dana Darurat				
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	- Dana Tunjangan Pendidikan	9.227.400,00	9.227.400,00		0,00
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.688.797.318.900,00	3.131.672.318.900,00	442.875.000.000,00	16,47



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
				5	6
1	2	3	4		
1	PENDAPATAN	3.435.484.000.000,00	3.759.599.666.400,00	324.115.666.400,00	9,43
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.563.704.000.000,00	1.686.947.580.400,00	123.243.580.400,00	7,88
1.1.1	Pajak Daerah	1.385.851.745.000,00	1.513.311.345.000,00	127.459.600.000,00	9,20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.950.050.000,00	13.133.650.000,00	(5.816.400.000,00)	(30,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	73.136.000.000,00	73.136.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.766.205.000,00	87.366.585.400,00	1.600.380.400,00	1,87
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.859.981.000.000,00	1.988.938.313.000,00	128.947.313.000,00	6,93
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.315.621.000.000,00	1.309.838.012.000,00	(5.782.988.000,00)	(0,44)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	512.083.000.000,00	646.813.301.000,00	134.730.301.000,00	26,31
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	32.287.000.000,00	32.287.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.789.000.000,00	83.713.773.000,00	71.924.773.000,00	610,10
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.789.000.000,00	45.291.600.000,00	33.502.600.000,00	284,19
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	14.171.250.000,00	14.171.250.000,00	0,00
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	24.250.923.000,00	24.250.923.000,00	0,00
		3.565.387.000.000,00	4.077.603.444.981,83	511.716.444.981,83	14,35

Tabel 2.J
Projeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APPD Tahun 2012

URIAH	APBD 2012	PROYEKSI APPD-P 2012	BERTRABAHI/ DAKARAN	Projeksi APPD - APPD 2012	
				Projeksi APPD	APPD 2012
DAPARDAN DAKARAH	4.939.117.990.000,00	5.026.222.103.378,00	R9.074.153.378,00	1.80	0,40
Departmen ASLI DAERAH	3.899.019.695.000,00	3.907.189.081.676,00	7.359.386.676,00		
Jak. DEPRAH	1.721.326.700.000,00	1.731.361.700.000,00	7.000.000.000,00	0,11	-2,90
asli PERPUSTAKAN Kekayanan YANG	16.805.995.000,00	16.318.700.500,00	(-87.254.500,00)	0,02	
PERSIL	87.919.000.000,00	87.969.000.000,00	70.000.000,00	1,13	1,13
Departmen Pendapatan ASLI DAERAH	70.568.000.000,00	71.574.611.176,00	1.006.641.176,00		
TING SAI	2.205.077.535,000,00	2.240.011.913,025,00	34.934.370,025,00	1,58	2,12
daan Bangkai/Sil Pajak/Bagil Iblisii	1.413.527,841.000,00	1.478.457.222,025,00	34.934.370,025,00		
Bagil Iblisii Taxjak	387.241.022.000,00	427.005.614.075,00	427.005.614.075,00	1,086	-0,67
Bagil Iblisii Pajak	1.056.298.772.000,00	1.049.172.355.950,00	(7.126.236.050,00)	1,086	0,00
Janji Alkesri Bumik DAU	716.153.261.000,00	716.153.261.000,00			
Janji Alkesri Klusus (DAK)	45.401.403.000,00	45.401.403.000,00			
Janji Alkesri Bumik	0,00				
Janji Alkesri Klusus	0,00				
Janji Alkesri Klusus (YANG)	5,50	46.600.388.677,00	881.021.188.677,00	20.352.900.000,00	0,00
Janji Alkesri Klusus (DAU)	0,00	20.352.900.000,00	20.352.900.000,00	20.352.900.000,00	0,00
Janji Alkesri Klusus (DAR)	0,00				
Janji Alkesri Klusus (BOS)	0,00	814.067.820.000,00	814.067.820.000,00	814.067.820.000,00	0,00
Sekolah (BOS)	0,00				
Sekolah SEA Games	100,00	10.000.000.000,00	10.000.000,00	5.093.388.677,00	100,00
T.A. 211	100,00				
Stoktan Gisa Dara dei Koni	100,00			5.093.388.677,00	100,00
Citra Lillith Wismi2	100,00			814.000.000,00	100,00

Tabel 4.1.
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2013

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2012	PROYEKSI APBD 2013		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	5.028.742.103.378,00	5.767.866.519.000,00	739.124.415.622,00	14,70
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.907.709.081.676,00	2.287.016.036.000,00	379.308.954.324,00	19,88
1.1.1.	- Pajak Daerah	1.731.326.700.000,00	1.994.720.400.000,00	263.393.700.000,00	15,21
1.1.2.	- Hasil Retribusi Daerah	15.958.740.500,00	16.565.200.000,00	606.459.500,00	3,60
1.1.3.	- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	87.969.000.000,00	145.043.436.000,00	57.074.436.000,00	64,88
1.1.4.	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	72.454.641.176,00	130.687.000.000,00	58.232.358.824,00	80,37
1.2.	Dana Perimbangan	2.240.011.913.025,00	2.644.842.763.000,00	404.830.849.975,00	18,07
1.2.1.	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.478.457.222.025,00	1.749.137.596.000,00	270.680.373.975,00	18,31
	- Bagi Hasil Pajak	429.284.686.075,00	558.070.090.000,00	128.785.403.925,00	30,00
	- Bagi Hasil Bukan Pajak	1.049.172.535.950,00	1.191.067.506.000,00	141.894.970.050,00	13,52
1.2.2.	- Dana Alokasi Umum (DAU)	716.153.261.000,00	870.516.767.000,00	154.363.506.000,00	21,55
1.2.3.	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.401.430.000,00	25.188.400.000,00	(20.213.030.000,00)	-44,52
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	881.021.108.677,00	836.007.720.000,00	(45.013.388.677,00)	-5,11
1.3.1.	- Pendapatan Hibah	20.352.900.000,00	21.252.900.000,00	900.000.000,00	
1.3.2.	- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	814.067.820.000,00	814.067.820.000,00		
1.3.3.	- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	687.000.000,00	687.000.000,00		
1.3.4.	- Setoran Dana sisa SEA Games 2011	40.000.000.000,00		(40.000.000.000,00)	
	- Setoran Sisa Dana dari KOTII	5.099.388.677,00		(5.099.388.677,00)	
	- Dana Hibah WISMP-2	814.000.000,00		(814.000.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.028.742.103.378,00	5.767.866.519.000,00	739.124.415.622,00	14,70



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.136.875.876.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	2.482.128.778.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.275.320.400.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.671.012.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.471.240.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	76.666.126.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.841.411.648.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.793.113.988.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	985.542.760.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.754.900.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	813.335.450.000,00
		813.335.450.000,00

PALEMBANG, 31 Desember 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. ALEX NOERDIN

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009**

URAIAN	2009		%tase Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	1.173.768.283.800,00	1.054.332.693.090,85	89,82
A.PAJAK DAERAH	1.035.104.831.900,00	895.326.986.412,00	86,50
PKB	335.817.700.000,00	348.968.143.638,00	103,92
PKAA	210.831.900,00	218.143.555,00	103,47
BBN-KB	385.792.900.000,00	278.888.857.221,00	72,29
BBN-KAA	20.000.000,00	21.211.750,00	106,06
PBB-KB	308.763.400.000,00	261.522.137.245,00	84,70
P3ABT	500.000.000,00	544.404.850,00	108,88
P3AP	4.000.000.000,00	3.659.473.121,00	91,49
PKB Alat Berat	-	1.366.279.764,00	100,00
BBN-KB Alat Berat	-	138.335.268,00	100,00
B.RETRIBUSI DAERAH	12.968.451.900,00	14.770.365.195,00	113,89
RPJK	4.540.140.000,00	5.297.538.000,00	116,68
Retribusi Lainnya	8.428.311.900,00	9.472.827.195,00	112,39
C.Hsl. Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	42.725.000.000,00	56.809.946.991,99	132,97
D.Lain-lain PAD Yang Sah	82.970.000.000,00	87.425.394.491,86	105,37
 BAGIAN DANA PERIMBANGAN	 1.505.609.787.700,00	 1.333.161.325.812,00	 88,55
A.BAGI HASIL PAJAK	344.722.387.700,00	323.125.391.903,00	93,73
PBB	251.042.700.000,00	232.146.374.427,00	92,47
BPHTB	21.986.626.900,00	20.521.391.907,00	93,34
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Psl. 21)	71.693.060.800,00	70.457.625.569,00	98,28
Cukai Hasil Tembakau	-	-	-
B.BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	653.531.520.000,00	502.680.050.909,00	76,92
IHH/PSDH	350.000.000,00	82.611.360,00	23,60
Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	13.681.520.000,00	2.435.500.557,00	17,80
Landrent	500.000.000,00	1.294.362.255,00	258,87
Iuran Ekplorasi (Royalty)	40.000.000.000,00	61.252.632.963,00	153,13
Minyak Bumi	290.000.000.000,00	155.554.791.427,00	53,64
Gas Alam	309.000.000.000,00	282.060.152.347,00	91,28
C.DANA ALOKASI UMUM	507.355.880.000,00	507.355.883.000,00	100,00
D.DANA ALOKASI KHUSUS	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	9.419.247.400,00	10.191.705.272,00	108,20
Pendapatan Hibah	9.410.020.000,00	9.628.980.272,00	102,33
Dana tunjangan Kependidikan	9.227.400,00	562.725.000,00	6.098,41
JUMLAH PENDAPATAN	2.688.797.318.900,00	2.397.685.724.174,85	89,17
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	288.684.482.976,62	288.684.450.776,62	100,00
JUMLAH I + II	2.977.481.801.876,62	2.686.370.174.951,47	90,22

LEMBAR TAHU
KEPALA SUKAGUMUMAN DAN KEPERLUAN
DISPELITA PADA TAHUN 2009

YUSRI HERWIKO, S.E, MM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010**

URAIAN	2010		%tase Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	1.363.164.448.550,00	1.369.935.856.700,26	100,50
A. PAJAK DAERAH	1.201.614.731.900,00	1.226.712.548.519,00	102,09
PKB	402.981.200.000,00	410.534.369.881,00	101,87
PKAA	210.831.900,00	199.076.950,00	94,42
BBN-KB	423.386.700.000,00	515.296.194.435,00	121,71
BBN-KAA	20.000.000,00	18.420.400,00	92,10
PBB-KB	370.516.000.000,00	295.156.403.880,00	79,66
P3ABT	500.000.000,00	158.611.597,00	31,72
P3AP	4.000.000.000,00	3.858.121.593,00	96,45
PKB Alat Berat	-	1.042.105.915,00	100,00
BBN-KB Alat Berat	-	449.243.868,00	100,00
B/ RETRIBUSI DAERAH	16.876.342.650,00	17.747.278.521,05	105,16
RPJK	5.246.480.000,00	6.023.965.950,00	114,82
Retribusi Lainnya	11.629.862.650,00	11.723.312.571,05	100,80
C/Hsl Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	59.297.374.000,00	62.606.133.112,90	105,58
D/Lain-lain PAD Yang Sah	85.376.000.000,00	62.869.896.547,31	73,64
 BAGIAN DANA PERIMBANGAN	 1.797.286.216.801,00	 1.823.059.236.629,00	 101,43
A/BAGI HASIL PAJAK	339.257.441.527,00	431.004.841.912,00	127,04
PBB	231.212.091.520,00	284.194.031.342,00	122,91
BPHTB	16.596.197.231,00	60.922.443.546,00	367,09
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Psl. 21)	90.918.454.158,00	85.275.995.480,00	93,79
Cukai Hasil Tembakau	530.698.618,00	612.371.544,00	115,39
B/BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	922.202.398.274,00	862.163.717.717,00	93,49
HH/PSDH	3.134.130.701,00	965.387.878,00	30,80
Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	-	-	-
Landrent	1.396.743.800,00	1.709.556.793,00	122,40
Iuran Explorasi (Royalty)	51.427.392.900,00	79.418.210.862,00	154,43
Minyak Bumi	251.681.682.730,00	244.318.029.778,00	97,07
Gas Alam	614.562.448.143,00	535.752.532.406,00	87,18
E/DANA ALOKASI UMUM	512.083.577.000,00	512.083.577.000,00	100,00
D/DANA ALOKASI KHUSUS	23.742.800.000,00	17.807.100.000,00	75,00
 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	 50.258.187.342,00	 29.593.713.804,00	 58,88
Pendapatan Hibah	11.141.946.000,00	12.090.225.200,00	108,51
Dana Tambahan Penghsl. Guru PNSD 2010	639.600.000,00	639.000.000,00	99,91
Dana Penguatan Infrastruktur dan Pras. Daerah	1.000.000.000,00	-	-
Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah	37.476.641.342,00	16.864.488.604,00	45,00
F/UMAH PENDAPATAN	3.210.708.852.693,00	3.222.588.807.133,26	100,37
G/ERIMAAN PEMBIAYAAN	315.043.083.496,18	315.250.643.936,18	100,07
JUMLAH I + II	3.526.751.936.189,18	3.537.839.451.069,44	100,34

SALAH SUGARAGA MUL DAN KEPEGAWAIAN
DIREKTORAT PUPR SUMSEL

YOSSEMIERVANDI, S.E,M.M.

PERATUHAN

17-01-2011

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011**

URAIAN	2011		%tase Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	1.687.295.615.400,00	1.849.119.912.016,18	109,59
PAJAK DAERAH	1.513.311.345.000,00	1.671.518.571.681,25	110,45
B	489.243.745.000,00	508.202.999.902,00	103,88
AA	211.000.000,00	191.950.125,00	90,97
NN-KB	614.757.600.000,00	781.649.668.321,00	127,15
NN-KAA	20.000.000,00	24.011.100,00	120,06
B-KB	405.079.000.000,00	375.173.930.914,80	92,62
ABT	-	67.467.385,00	100,00
AP	4.000.000.000,00	4.733.870.790,45	118,35
B Alat Berat	-	1.280.281.391,00	100,00
NN-KB Alat Berat	-	194.391.752,00	100,00
TRIBUSI DAERAH	13.133.650.000,00	11.682.781.650,11	88,95
PJK	-	130.475.000,00	100,00
tribusi Lainnya	13.133.650.000,00	11.552.306.650,11	87,96
sl. Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	73.136.000.000,00	78.956.547.984,99	107,96
lain-lain PAD Yang Sah	87.714.620.400,00	86.962.010.699,83	99,14
GIAN DANA PERIMBANGAN	1.988.938.313.000,00	1.992.557.000.412,00	100,18
AGI HASIL PAJAK	387.224.072.000,00	379.632.596.614,00	98,04
BB	277.903.847.500,00	289.270.628.318,00	104,09
PHTB	-	532.000,00	100,00
agi Hasil Pajak Penghasilan (Psl. 21)	108.771.283.000,00	90.349.570.421,00	83,06
Cukai Hasil Tembakau	548.941.500,00	11.865.875,00	2,16
BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	922.613.940.000,00	933.824.102.798,00	101,22
IHH/PSDH	4.088.593.000,00	4.102.790.266,00	100,35
uran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	-	-	-
landrent	3.423.080.000,00	3.107.542.631,00	90,78
uran Ekplorasi (Royalty)	66.315.169.400,00	120.627.357.477,00	181,90
Minyak Bumi	239.059.182.700,00	243.954.435.262,00	102,05
Gas Alam	609.727.914.900,00	562.031.977.162,00	92,18
DANA ALOKASI UMUM	646.813.301.000,00	646.813.301.000,00	100,00
DANA ALOKASI KHUSUS	32.287.000.000,00	32.287.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	112.444.773.000,00	122.308.053.733,00	108,77
Pendapatan Hibah	12.191.600.000,00	22.054.880.733,00	180,90
Dana Tambahan Penghsl. Guru PNSD 2011	-	-	-
Dana Perctpn Pembngn Infrastruktur Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah	24.250.923.000,00	24.250.923.000,00	100,00
Dana tunjangan Kependidikan	671.250.000,00	671.250.000,00	100,00
Untuk Pembangunan Venues Sea Games	61.831.000.000,00	61.831.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.788.678.701.400,00	3.963.984.966.161,18	104,63
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.138.344.659,83	390.314.821.572,83	100,05
JUMLAH I + II	4.178.817.048.259,83	4.354.299.787.734,01	104,20

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2012 ✓**

URAIAN	2012 ✓		%tase Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD) DAERAH	1.907.709.081.676,00	2.001.714.583.551,61	104,93
K	1.731.326.700.000,00	1.803.818.849.293,00	104,19
KB	577.307.600.000,00	594.502.405.046,00	102,98
KA	211.000.000,00	219.692.550,00	104,12
KB	743.709.100.000,00	753.808.370.196,00	101,36
BT	20.000.000,00	18.167.550,00	90,84
P	405.079.000.000,00	447.508.443.100,00	110,47
Alat Berat	5.000.000.000,00	6.017.839.107,00	120,36
N-KB Alat Berat	-	957.515.184,00	100,00
TRIBUSI DAERAH	15.958.740.500,00	13.332.878.781,45	83,55
JK	15.958.740.500,00	13.332.878.781,45	83,55
tribusi Lainnya	87.969.000.000,00	85.892.644.193,47	97,64
I. Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan dari PAD Yang Sah	72.454.641.176,00	98.670.211.283,69	136,18
GIAN DANA PERIMBANGAN	2.240.011.913.025,00	2.378.798.650.801,00	106,20
BAGI HASIL PAJAK	429.284.686.075,00	490.241.629.883,00	114,20
BB	297.401.741.156,00	343.553.987.656,00	115,52
IPTB	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Psl. 21)	130.856.009.414,00	145.460.936.576,00	111,16
Cukai Hasil Tembakau	1.026.935.505,00	1.226.705.651,00	119,45
BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	1.049.172.535.950,00	1.127.002.329.918,00	107,42
IHH/PSDH	2.965.454.855,00	6.594.423.797,00	222,37
Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	2.312.960,00	693.888,00	30,00
Landrent	2.318.378.247,00	4.599.817.979,00	198,41
Iuran Ekplorasi (Royalty)	100.915.861.573,00	137.727.404.097,00	136,48
Minyak Bumi	301.867.315.470,00	282.184.157.400,00	93,48
Gas Alam	641.103.212.845,00	695.895.832.757,00	108,55
C. DANA ALOKASI UMUM	716.153.261.000,00	716.153.261.000,00	100,00
D. DANA ALOKASI KHUSUS	45.401.430.000,00	45.401.430.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	881.021.108.677,00	843.426.839.966,00	95,73
Pendapatan Hibah	20.352.900.000,00	20.509.442.386,00	100,77
Dana Tambahan Pengsl. Guru PNSD	687.000.000,00	687.000.000,00	100,00
Dana BOS	814.067.820.000,00	777.088.050.000,00	95,46
Sisa Dana Panitia Sea Games	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00
Pengembalian sisa dana KONI	5.099.388.677,00	5.142.347.580,00	100,84
Dana Hibah Wismp-2	814.000.000,00	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	5.028.742.103.378,00	5.223.940.074.318,61	103,88
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	477.175.784.943,54	477.175.784.943,54	100,00
JUMLAH I + II	5.505.917.888.321,54	5.701.115.859.262,15	103,55


 TOSI HERVIA SRI SRI M
 DEPUTY CHIEF OF STAFF FOR POLITICAL AFFAIRS

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013**

URAIAN	2013		%tase Realisasi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN DAERAH	6,000,782,738,000.00	5,468,139,691,033.10	91.12
PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	2,214,420,245,000.00	2,021,696,787,275.10	91.30
PENDAPATAN DAERAH	1,999,720,400,000.00	1,882,596,915,640.00	94.14
	663,903,700,000.00	663,422,958,598.00	99.93
	211,000,000.00	202,550,725.00	96.00
	870,496,700,000.00	704,501,493,444.00	80.93
	30,000,000.00	24,589,155.00	81.96
	460,079,000,000.00	508,333,162,553.00	110.49
	5,000,000,000.00	5,124,607,040.00	102.49
PENDAPATAN ALAT BERAT	-	871,243,600.00	-
PENDAPATAN ALAT BERAT	-	116,310,525.00	-
PENDAPATAN KERIBUSI DAERAH	16,771,950,000.00	16,522,296,308.00	98.51
PENDAPATAN KERIBUSI Lainnya	16,771,950,000.00	16,522,296,308.00	98.51
PENDAPATAN Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	92,935,500,000.00	59,352,768,749.12	63.86
PENDAPATAN lain PAD Yang Sah	104,992,395,000.00	63,224,806,577.98	60.22
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	2,951,325,613,000.00	2,649,216,454,338.00	89.76
PENDAPATAN HASIL PAJAK	569,364,334,000.00	572,654,633,975.00	100.58
	401,842,663,320.00	437,487,000,115.00	108.87
	166,268,116,680.00	133,559,727,861.00	80.33
	1,253,554,000.00	1,607,905,999.00	128.27
PENDAPATAN HASIL BUKAN PAJAK SDA	1,486,256,112,000.00	1,180,856,653,363.00	79.45
PENDAPATAN PSDH	3,838,701,900.00	2,268,620,941.00	59.10
PENDAPATAN Hak Pengusaha Hutan (IHPH)	3,010,000.00	-	-
PENDAPATAN Rent	4,604,303,850.00	4,389,454,372.00	95.33
PENDAPATAN Ekplorasi (Royalty)	183,154,669,993.00	124,296,386,568.00	67.86
PENDAPATAN Bumi	313,155,998,288.00	251,674,278,641.00	80.37
PENDAPATAN Alam	981,499,427,969.00	798,227,912,841.00	81.33
PENDAPATAN ALOKASI UMUM	870,516,767,000.00	870,516,767,000.00	100.00
PENDAPATAN ALOKASI KHUSUS	25,188,400,000.00	25,188,400,000.00	100.00
PENDAPATAN LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	835,036,880,000.00	797,226,449,420.00	95.47
PENDAPATAN Hibah	21,252,900,000.00	20,463,247,966.00	96.28
PENDAPATAN Tambahan Penghsl. Guru PNSD 2010	780,000,000.00	780,000,000.00	100.00
PENDAPATAN BOS	812,555,450,000.00	775,926,524,654.00	95.49
PENDAPATAN WISMP-2	448,530,000.00	56,676,800.00	12.64
PENDAPATAN	6,000,782,738,000.00	5,468,139,691,033.10	91.12

DARCE ERLUI
PENGAWAS PEMERINTAHAN
DISPERINDAGRI PROV. SULSEL

YOSSI HERWANDI, S.E.,M.M.

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2014 ✓**

Target Tahapan 100 %

No.	URAIAN	Target 2014	REALISASI	%
	PENDAPATAN DAERAH	6.478.705.535.564,65	6.237.392.909.543,51	96,28
I.	PEND. ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)	2.595.724.088.303,00	2.407.927.104.791,86	92,77
A	PAJAK DAERAH	2.425.320.400.000,00	2.267.779.726.026,50	93,50
	PKB	812.902.152.908,00	749.169.627.264,00	92,16
	PKAA	211.000.000,00	211.799.250,00	100,38
	BBN - KB	870.285.567.745,00	686.782.045.415,00	78,91
	BBN-KAA	30.000.000,00	42.464.900,00	141,55
	PBB - KB	475.079.000.000,00	591.598.965.632,00	124,53
	PAP	5.000.000.000,00	5.616.525.868,50	112,33
	PKB Alat Berat	1.001.547.092,00	1.382.893.847,00	138,08
	BBN-KB Alat Berat	211.192.255,00	1.366.907.293,00	647,23
	PAJAK ROKOK	260.600.000.000,00	231.608.496.557,00	88,08
B	RETRIBUSI DAERAH	13.141.360.500,00	11.457.554.354,00	87,19
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	49.508.322.803,00	30.618.098.292,55	61,84
D	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	107.754.005.000,00	98.071.726.118,81	91,01
II.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	3.056.056.793.031,00	2.982.866.000.798,00	97,61
A	BAGI HASIL PAJAK	497.915.041.580,00	548.870.331.198,00	110,23
	PBB	322.331.652.100,00	403.772.228.167,00	125,27
	BPHTB			
	BAGI HASIL PAJAK PENGHSL (PSL 21)	173.865.534.315,00	144.321.923.565,00	83,01
	CUKAI HASIL TEMBAKAU	1.717.855.175,00	776.179.466,00	45,18
B	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA	1.509.844.091.441,00	1.385.698.009.600,00	91,78
	IHH / PSDH	11.423.956.505,00	301.565.508,00	2,64
	Juran Hak Pengusaha Hutan (JPHH)		7.996.769.553,00	
	Landrent	13.733.832.736,00	10.670.011.578,00	77,69
	Juran Explorasi (Royalty)	287.314.773.600,00	209.143.920.788,00	72,79
	Minyak Bumi	254.287.995.000,00	295.516.185.340,00	116,21
	Gas Alam	943.083.533.600,00	862.069.556.773,00	91,41
C	DANA ALOKASI UMUM	985.542.760.000,00	905.542.760.000,00	100,00
D	DANA ALOKASI KHUSUS	62.754.900.000,00	62.754.900.000,00	100,00
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SYAH	826.924.654.230,65	846.599.803.953,65	102,38
	-Pendapatan Hibah	4.755.110.661,00	20.252.265.384,00	425,91
	-Dana Tmbhn. Pengh. Guru PNSD 2010	780.000.000,00	534.000.000,00	68,46
	-Dana BOS	805.514.020.000,00	809.938.015.000,00	100,55
	-Piulang dana shering Jamsoskes kab Kota	15.875.523.569,65	15.875.523.569,65	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.478.705.535.564,65	6.237.392.909.543,51	96,28

* Realisasi bln Desember 2014, data sudah rekondisi belum disyahkan ✓

PALEMBANG, 12 JANUARI 2015

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

H.MUSLIM, S.E.M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196407301992031004

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2009?**
- 2. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2010?**
- 3. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2011?**
- 4. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2012?**
- 5. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2013?**
- 6. Bagaiman alokasi perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2014?**
- 7. Apa yang menyebabkan tejadinya penurunan dan peningkatan dalam realisasi perubahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2009-2014?**



بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FITRIANI	PEMBIMBING
NIM : NIM : 222011070	KETUA : MUHAMMAD FAHMI, M.Si
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS ALOKASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	21/5	Bab 1, 2, 3	M		bab-1 !
2					
3	10/6	Jane	M		bab-1 !
4					
5	27/6	Bab 4, 5, 6	M		bab-1 !
6					
7	4/7	Analisis	M		bab-1 !
8					
9	10/7	Les nye	M		bab-1 !
10					
11	12/7	All Abstract	M		Acc akhir
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN POM IX KAMPUS - PALEMBANG - KODE POS 30137
TELEPON (0711) 310633, 355107 FAX (0711) 319819
website : dispenda.sumselprov.go.id

Palembang, 4 November 2014

Nomor : 423.4/I/*000861* /Penda
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian / riset

Kepada
Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di
Palembang

Menjawab surat Saudara Nomor : 266/H-5/FEB-UMP/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Izin Penelitian untuk Skripsi atas nama Fitriani NIM 22 2011 070, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang untuk bahan kajian ilmiah dan tidak untuk disebarluaskan.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MUSLIM, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407301992031004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JALAN POM IX KAMPUS - PALEMBANG - KODE POS 30137
TELEPON (0711) 310633, 355107 FAX (0711) 319819
website : dispenda.sumseiprov.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 123 Tahun 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	FITRIANI
NIM	:	222011070
Fakultas	:	EKONOMI
Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Telah melaksanakan Penelitian dan Riset pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015, sesuai surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah nomor : 266/H-5/FEB-UMP/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 15 Agustus 2015

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS,



Drs. H. ZAINUDDIN ISMAIL, M.M.
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 195904131979071001



اللهم اخْرُجْ عَلَيْهِ حَسْدَهُ وَرَحْمَةَ أَنْتَ هُوَ بِهَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

SURAT KETERANGAN
No. 135 / Abstract/LB/UMP/VII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Genta Ulina Hutagalung, S.Pd.,M.Pd.
Status : Tentor Pelatihan TOEFL
NIDN : -
Alamat : Jl. Seruni Bukit Besar Palembang
No. Telpo : 082153968681

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Fitriani
NIM : 222011070
Judulskripsi : Analisis Alokasi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 Juli 2015

Genta Ulina H, S.Pd.,M.Pd



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

296/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FITRIANI
NIM : 222011070
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 08 Juli 2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV

Drs. Mulyadi, M.H.I.





DAFTAR NILAI

NAMA : FITRIANI
NIM : 222011070

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-BAIYINAH	50	10	10	70
2	AL-ZALZALAH	50	10	10	70
3	AL-ADIYAT	50	10	10	70
4	AL-QARI'AH	55	10	10	75
5	AT-TAKATSUR	50	10	10	70
6	AL-ASHR	60	20	20	100
7	AL-HUMAZAH	60	20	20	100
8	AL-FIL	60	20	20	100
9	QURAISY	60	20	20	100
10	AL-MA'UN	60	20	20	100
11	AL-KAUTSAR	60	20	20	100
12	AL-KAFIRUN	60	20	20	100
13	AN-NASHR	60	20	20	100
14	AL-LAHAB	60	20	20	100
15	AL-IKHLAS	60	20	20	100
16	AL-FALAQ	60	20	20	100
17	AN-NAS	60	20	20	100
18	AD-DHUHA	55	20	20	95
19	AL-INSYIRAH	50	20	20	90
20	AT-TIN	55	20	20	95
21	AL-ALAQ	55	20	20	95
22	AL-QADAR	50	20	20	90



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

P J A G A M

No.509/H-4/LPKKN/UMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Fitriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 222010070
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Tanjung Sejaro, 30-03-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Arisan Buntal
Kecamatan : Kayuagung
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui
Rektor
Dr.H. M. Idris, S.E., M.Si.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 30 Maret 2015
Ketua LPKKN
Ir. Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Fitriani
Place/Date of Birth : Tanjung Sejaro, March 30th 1992
Test Times Taken : +2
Test Date : July 27th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	44
Structure Grammar	:	42
Reading Comprehension	:	45
OVERALL SCORE	:	436

Palembang, July 26th, 2015
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

BIODATA PENULIS

Nama : FITRIANI

Nim : 22 2011 070

Tempat /Tanggal Lahir : Tanjung Sejaro, 30 Maret 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama ; Islam

**Alamat : Jl. Lintas Timur Desa Tanjung Sejaro, Kec Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir**

No. HP : 085769051677

Nama Orang Tua

Ayah : FIRMANSYAH

Ibu : RUSMINI

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, Agustus 2015

FITRIANI